

# ANALISIS PEMERATAAN PENDAPATAN KOTA BINJAI 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BINJAI**

# **ANALISIS PEMERATAAN PENDAPATAN KOTA BINJAI 2017**



# **ANALISIS PEMERATAAN PENDAPATAN KOTA BINJAI 2017**

**No.ISBN : 978-602-53496-0-7**  
**No.Publikasi : 12760.1810**  
**Katalog : 3201027.1276**

**Ukuran Buku : 27,9 cm x 21 ,59 cm**  
**Jumlah Halaman : xii + 44**

**Naskah**

**Seksi Statistik Sosial BPS Kota Binjai**

**Penyunting Naskah**

**Seksi Statistik Sosial BPS Kota Binjai**

**Gambar Kover**

**Seksi Statistik Sosial BPS Kota Binjai**

**Diterbitkan oleh**

**© Badan Pusat Statistik Kota Binjai**

**Dicetak oleh**

**CV.Rilis Grafika**

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.**

# **TIM PENYUSUN**

**ANALISIS PEMERATAAN PENDAPATAN KOTA BINJAI**

**2017**

**Penanggung Jawab Umum**

**Ir. Ida Suswati, M.Si**

**Koordinator**

**Editor dan Penanggung Jawab Teknis**

**Martua Ponidi Samosir, S.Si**

**Ulasan**

**Gambar Grafik dan Infografis**

**Gambar Kulit dan Tata Letak**

**Ragdad Cani Miranti, SST**



## KATA PENGANTAR

Keberhasilan pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah pada khususnya sampai saat ini masih perlu diupayakan. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pemerataan, pertumbuhan dan pengembangan daerah.

Salah satu tujuan dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan pendapatan masyarakat agar semua masyarakat dapat hidup dengan layak. Adapun tujuan diterbitkannya publikasi Analisis Pemerataan Pendapatan Kota Binjai 2017 ini adalah untuk mengetahui perkembangan tingkat pendapatan sekaligus tingkat pemerataan pendapatan penduduk di Kota Binjai sehingga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah setempat dalam pengambilan strategi kebijakan yang tepat sasaran.

Pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi - tingginya kepada semua pihak yang telah menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam penyusunan publikasi ini.

Binjai, November 2018

**Kepala Badan Pusat Statistik**

**Kota Binjai**



**IDA SUSWATI**



# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>3</b>
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Tujuan .....	4
1.3 Sistematika Penyajian .....	4
<b>II. METODOLOGI</b> .....	<b>7</b>
2.1 Konsep dan Definisi .....	7
2.1.1 Rumah tangga dan anggota rumah tangga .....	7
2.1.2 Pendidikan .....	7
2.1.3 Ketenagakerjaan .....	8
2.1.4 Produk Domestik Regional Brutto .....	8
2.2 Metode Penghitungan .....	9
<b>III. KONDISI UMUM SOSIAL EKONOMI</b> .....	<b>15</b>
3.1 Letak Geografis .....	15
3.2 Kependudukan .....	16
3.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	16
3.2.2 Struktur Umur Penduduk .....	18
3.3 Pendidikan .....	20
3.4 Ketenagakerjaan .....	23
3.5 Kemiskinan.....	25
3.6 Struktur Perekonomian .....	28
3.6.1 PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi .....	28
3.6.2 PDRB per Kapita .....	29



## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>IV. PEMERATAAN PENDAPATAN .....</b>	<b>33</b>
4.1 Perkembangan Tingkat Pendapatan .....	33
4.2 Pemerataan Pendapatan .....	36
<b>V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>43</b>
5.1 Kesimpulan .....	43
5.2 Rekomendasi .....	44

<https://binjaikota.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Binjai, 2000 - 2017 .....	17
Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Binjai menurut Kelompok Umur, 2010 - 2017 .....	18
Tabel 3.3 Persentase Penduduk Kota Binjai menurut Kelompok Umur, 2010 - 2017 .....	19
Tabel 3.4 Rasio Ketergantungan Usia Penduduk Kota Binjai, 2010 - 2017 .....	20
Tabel 3.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Binjai dan Sumatera Utara, 2017 .....	20
Tabel 3.6 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Binjai dan Sumatera Utara 2017 .....	22
Tabel 3.7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan selama Seminggu yang Lalu di Kota Binjai, 2017 .....	23
Tabel 3.8 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama Seminggu di Kota Binjai, 2017 .....	24
Tabel 3.9 Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Binjai, 2011 - 2017 .....	27
Tabel 3.10 Produk Domestik Regional Bruto Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) atas Dasar Harga Konstan Kota Binjai, 2011 - 2017 .....	29
Tabel 3.11 Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Seri 2010 atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan Kota Binjai, 2011 - 2017 .....	30
Tabel 4.1 Persentase Penduduk Kota Binjai Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan, 2017 .....	34
Tabel 4.2 Pengeluaran Perkapita Per bulan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kota Binjai dan Sumatera Utara, Tahun 2017 .....	35
Tabel 4.3 Persentase Pengeluaran Perkapita Per bulan Konsumsi Makanan dan Non Makanan Kota Binjai dan Sumatera Utara, Tahun 2017 .....	35



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 3.1	Persentase Penduduk Kota Binjai menurut Komposisi Umur, 2012 - 2017 ..... 19
Gambar 3.2	Persentase Penduduk yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Binjai dan Sumatera Utara, 2017 ..... 21
Gambar 3.3	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah Tertinggi yang Dimiliki di Kota Binjai dan Sumatera Utara, 2017 ..... 22
Gambar 4.1	Contoh Kurva Lorenz ..... 37
Gambar 4.2	Kurva Lorenz Tingkat Pemerataan Penduduk Kota Binjai, 2017 ..... 38
Gambar 4.3	Perkembangan Gini Rasio di Kota Binjai, 2008 - 2017 ..... 39

<https://binjaikota.bps.go.id>



**BAB**

**1**

**PENDAHULUAN**

<https://binarangkota.bps.go.id>



**Analisis  
Pemerataan  
Pendapatan Kota  
Binjai Tahun 2017**

# PENDAHULUAN

*BAB*  
*I*

<b>METODOLOGI</b>	<b>2</b>
<b>KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA</b>	<b>3</b>
<b>PEMERATAAN PENDAPATAN</b>	<b>4</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>5</b>

## 1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan “visi” BPS yaitu Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua, maka BPS bertanggungjawab atas ketersediaan data dan informasi yang berkesinambungan dan *up to date* yang dapat dipergunakan untuk mendukung perencanaan pembangunan. Salah satu informasi yang sangat diperlukan pemerintah adalah mengenai tingkat kesejahteraan rakyat dan pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Untuk mendukung informasi tersebut, BPS melakukan sensus dan survei, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) dan Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS).

Keberhasilan pembangunan di suatu daerah dilihat dari tingginya pendapatan dan pemerataan pendapatan masyarakat. Oleh sebab itu, untuk mengetahui bagaimana keberhasilan pembangunan di Kota Binjai, salah satu indikatornya adalah dari perhitungan pendapatan perkapita. Sedangkan untuk melihat pemerataan pendapatan yang diterima masyarakat, dilakukan penghitungan distribusi pendapatan melalui analisis penghitungan “Gini Rasio”. Dengan demikian, untuk mengetahui distribusi pendapatan masyarakat Kota Binjai, dilakukan analisis Perhitungan Gini Rasio Kota Binjai.

### Tahukah Anda?

Koefisien Gini adalah ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, *Corrado Gini*, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya, *Variabilità e mutabilità*.





## 1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dilakukannya analisis ini adalah :

1. Untuk mengetahui kondisi umum sosial ekonomi penduduk Kota Binjai.
2. Untuk mengetahui perkembangan tingkat pendapatan penduduk Kota Binjai
3. Untuk mengetahui perkembangan pemerataan pendapatan penduduk Kota Binjai
4. Sebagai bahan rekomendasi bagi Pemerintah Kota Binjai dalam menentukan strategi dan program pembangunan yang akan dicanangkan.

## 1.3 Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian dalam analisis Gini Rasio dikelompokkan ke dalam beberapa bagian yaitu :

**Bab I. Pendahuluan**, yang berisi latar belakang dari penulisan analisis ini beserta maksud dan tujuannya.

**Bab II. Metodologi**, yang berisi dari sumber data yang digunakan, konsep definisi dan uraian singkat mengenai penghitungan indikator pemerataan.

**Bab III. Kondisi Umum Sosial Ekonomi**, yang berisi kondisi umum sosial ekonomi penduduk Kota Binjai, khususnya dalam aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan dan perekonomian yang digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis.

**Bab IV. Pemerataan Pendapatan**, yang merupakan bagian utama yang mengulas mengenai tingkat dan pemerataan pendapatan penduduk Kota Binjai.

**Bab V. Kesimpulan dan Rekomendasi**, yang berisi kesimpulan serta rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.



**BAB**

**2**

**METODOLOGI**

<https://bit.ly/mota.bps.go.id>



**Analisis  
Pemerataan  
Pendapatan Kota  
Binjai Tahun 2017**

# METODOLOGI

**BAB  
II**

“Data yang digunakan sebagai bahan penghitungan gini rasio bersumber dari data konsumsi dan pengeluaran yang dihasilkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).”

## 2.1.1 Rumah tangga dan anggota rumah tangga

Rumah tangga dalam konsep BPS dibedakan menjadi dua, yaitu rumah tangga biasa dan rumah tangga khusus. **Rumah tangga biasa** adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasa makan bersama dari satu

dapur atau pengelolaan makan sehari-harinya dilakukan bersama-sama menjadi satu. Sedangkan **rumah tangga khusus** yaitu orang-orang yang tinggal di asrama, tangsi, panti asuhan, lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos)

dan berjumlah 10 orang atau lebih. Rumah tangga khusus **tidak dicakup dalam Susenas.**

## 2.1.2 Pendidikan

**Sekolah** adalah pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

**Tidak/belum pernah bersekolah** ada-

lah mereka yang tidak atau belum pernah sekolah. Termasuk mereka yang tamat/belum tamat kanak-kanak yang tidak melanjutkan ke SD.

**Masih bersekolah** adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan pada tingkat dasar, menengah dan tinggi.



Tidak sekolah lagi adalah mereka yang pernah mengikuti pendidikan dasar, menengah atau tinggi, tetapi pada saat pencacahan tidak sekolah lagi.

### 2.1.3. Ketenagakerjaan

**Angkatan kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu mempunyai pekerjaan, dan bekerja paling sedikit 1 jam selama seminggu yang lalu maupun sementara tidak bekerja (petani yang sedang menunggu panen, pegawai yang sedang cuti, dll) .

**Bukan angkatan kerja** adalah mereka yang berumur 15 tahun keatas dan selama seminggu yang lalu hanya sekolah, dan atau mengurus rumahtangga, dan tidak melakukan suatu kegiatan yang dapat dimasukkan dalam kategori bekerja, sementara tidak bekerja atau mencari pekerjaan.

**Kegiatan terbanyak dilakukan** adalah kegiatan yang menggunakan waktu terbanyak dibandingkan dengan kegiatan lainnya.

**Bekerja** adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu yang lalu secara berturut-turut. Termasuk didalamnya pekerja keluarga yang bekerja tanpa upah yang bekerja membantu dalam usaha.kegiatan ekonomi.

### 2.1.4. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

**PDRB** adalah seluruh nilai barang dan jasa dari produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah. PDRB merupakan indikator ekonomi yang digunakan untuk mengukur tingkat produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah.

**PDRB atas dasar harga konstan 2010** adalah seluruh nilai barang dan jasa dari produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah pada tahun tertentu dihitung berdasarkan harga pada tahun 2010, sehingga ukuran ini sudah dihilangkan dari pengaruh inflasi.

**PDRB atas dasar harga berlaku** adalah seluruh nilai barang dan jasa dari produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah pada tahun tertentu dihitung berdasarkan harga pada tahun bersangkutan sehingga ukuran ini masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Laju pertumbuhan PDRB diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke-n terhadap nilai pada tahun ke n-1 (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke n-1, kemudian dikalikan dengan 100 persen.

## 2.2 Metode Penghitungan

**Pengeluaran rata-rata perkapita/bulan** adalah rata-rata biaya yang dikeluarkan rumah tangga sebulan untuk konsumsi semua anggota rumahtangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

Secara singkat berikut akan diulas mengenai metode penghitungan distribusi pendapatan dengan menggunakan gini rasio. Penghitungan distribusi pendapatan dengan menggunakan metode Gini Rasio sudah sangat lama dilakukan di Indonesia, baik dengan menggunakan data pengeluaran maupun data pendapatan. Cara distribusi pendapatan nasional akan menentukan bagaimana pendapatan nasional yang tinggi mampu menciptakan perubahan dan perbaikan dalam masyarakat, seperti mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesulitan-kesulitan lain dalam masyarakat. Distribusi pendapatan yang tidak merata, tidak akan menciptakan kemakmuran bagi masyarakat umum, disamping itu juga akan menciptakan kemakmuran bagi golongan tertentu saja.

Rumus dari Gini Rasio adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - S \sum f_{pi} \times (F_{ci} + F_{ci-1})$$

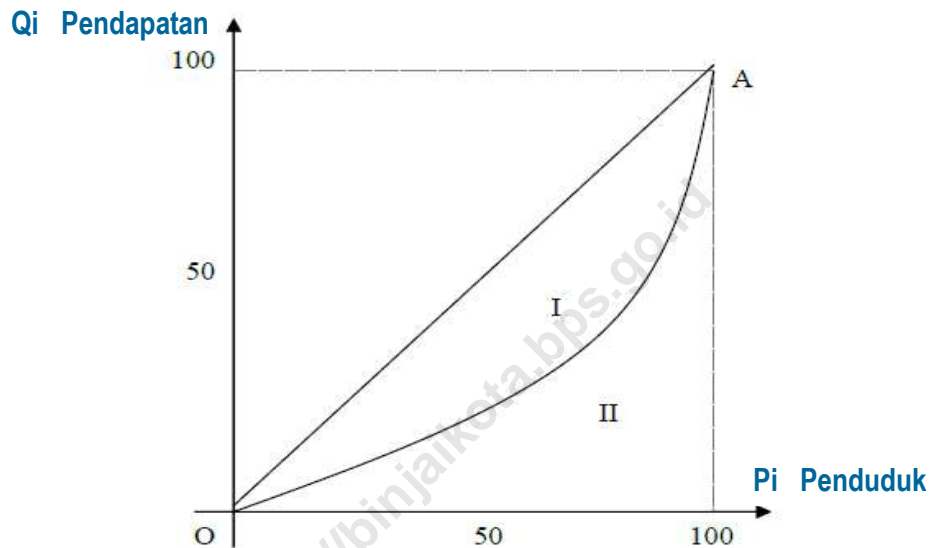
**GR** : Gini Rasio

**f<sub>pi</sub>** : Frekuensi penduduk di kelas pengeluaran ke-i

**F<sub>ci</sub>** : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran di kelas pengeluaran ke - i

**F<sub>ci-1</sub>** : Frekuensi kumulatif jumlah pengeluaran di kelas pengeluaran ke - (i-1)

Nilai Gini Rasio berkisar antara 0 dan 1 dimana makin besar angka Gini Rasio maka makin timpang distribusi pendapatannya. **Gini Rasio=0** menandakan adanya pemerataan yang sempurna artinya setiap kelompok penduduk mempunyai tingkat pengeluaran (pendapatan) yang sama, sedangkan **Gini Rasio=1** berarti terjadi ketimpangan sempurna. Hasil perhitungan yang dilakukan selama ini menunjukkan bahwa data pengeluaran cenderung menghasilkan angka Gini Rasio yang lebih rendah dibandingkan dengan jika menggunakan data pendapatan. Ukuran Gini Rasio biasanya didampingi oleh Kurva Lorenz, seperti gambar dibawah ini.



Kurva tersebut memperlihatkan hubungan antara penduduk/rumahtangga sebagai penerima pendapatan dan jumlah nilai pendapatan yang diterima. Bentuk Kurva Lorenz digambarkan dengan segi empat sama sisi dimana sumbu horizontal menunjukkan persentase jumlah penduduk/rumahtangga sedangkan sumbu vertikal menunjukkan jumlah pendapatan yang diterima yang disusun secara kumulatif (dari yang berpendapatan/jumlah rumah tangga/penduduk yang terendah hingga yang tertinggi).

Kurva Lorenz merupakan titik-titik dengan sumbu horizontal persentase kumulatif rumah tangga ( $P_i$ ) dan sumbu vertikal persentase kumulatif pendapatan ( $Q_i$ ), maka kurva tersebut menunjukkan ada  $P_i$  persen penduduk /rumah tangga yang menikmati  $Q_i$  persen pendapatan. Apabila kurva Lorenz terus mendekati garis diagonal OA, maka rasio semakin kecil, berarti semakin merata. Karena idealnya Lorenz harus berimpit dengan OA baru dikatakan pemerataan yang adil. Dalam keadaan distribusi pendapatan yang sempurna, maka  $Y$  persen dari jumlah rumah tangga/penduduk akan menerima  $Y$  persen dari jumlah pendapatan. Kurva Lorenz keadaan ini digambarkan sebagai garis diagonal dari sudut kanan atas

(koefisien gini = 0). Sebaliknya bila keadaan distribusi pendapatan tidak sempurna, maka Y persen sejumlah penduduk/rumah tangga menerima Y persen jumlah pendapatan, sehingga Kurva Lorenz akan menyimpang dari garis diagonalnya. Hal ini terjadi karena kurva tersebut disusun menggunakan persentase kumulatif (dari yang terendah hingga yang tertinggi). Jika penyimpangan Kurva Lorenz tersebut terhadap garis diagonal memberat kebawah, artinya bertambah tidak meratanya distribusi pendapatan tersebut. Semakin berat ke bawah bentuk kurva semakin cembung atau dalam keadaan tidak merata sempurna.

<https://binjaikota.bps.go.id>





# KONDISI SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA



## PDRB Kota Binjai

PDRB Kota Binjai atas dasar Harga Berlaku ( dalam ribu rupiah) 2015 - 2017

Rp.9.857.849,5 2017

Rp.9.077.474,3 2016

Rp.8.382.405,1 2015



## PDRB per Kapita Kota Binjai

PDRB per Kapita Kota Binjai atas dasar Harga Berlaku ( dalam ribu rupiah) 2015 - 2017

Rp.36.385,76 2017

Rp.33.837,03 2016

Rp.31.669,12 2015

Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Binjai, 2017



Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan



Laki-laki

11,17 %



Perempuan

2,82 %



Manufaktur

29,18 %

11,63 %



Jasa

59,65 %

85,55 %

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BINJAI



**Analisis  
Pemerataan  
Pendapatan Kota  
Binjai Tahun 2017**

# **KONDISI UMUM SOSIAL EKONOMI**

*BAB  
III*

Wilayah Kota Binjai seluas 90,23 km persegi yang dikelilingi oleh Kabupaten Deli Serdang dan Langkat. Secara geografis terletak pada  $3^{\circ} 31' 40'' - 3^{\circ} 40' 2''$  Lintang Utara dan  $98^{\circ} 27' 3'' - 98^{\circ} 32' 32''$  Bujur Timur serta terletak pada 30 m di atas permukaan laut, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang

Sebelah Timur : Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang

Sebelah Selatan : Kecamatan Sei Bingei Kabupaten Langkat dan Kecamatan Kutalimbaru Kabupaten Deli Serdang

Sebelah Barat : Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat

Kota Binjai adalah daerah yang beriklim tropis dengan 2 (dua) musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kota Binjai terbagi atas 5 kecamatan yang terdiri dari 37 kelurahan dan 284 lingkungan.

## 3.2 Kependudukan

Kependudukan merupakan aspek yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan. Penduduk merupakan objek sekaligus subjek dalam pembangunan. Penduduk tidak saja mencakup jumlah, namun termasuk juga komposisi dan distribusinya. Jumlah penduduk yang besar dan kurang seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat mempengaruhi segala segi pembangunan dan kehidupan masyarakat sedangkan jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan salah satu modal dasar bagi pembangunan nasional.

Oleh karena itu sasaran pembangunan kependudukan adalah meningkatkan kualitas penduduk dan termasuk penyebarannya guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera maju dan mandiri.

### 3.2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Penduduk bukan hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi sekaligus juga sebagai subjek dari pembangunan. Oleh sebab itu, penduduk selain menjadi modal pembangunan tetapi bisa juga menjadi beban dalam proses pembangunan. Penduduk dapat menjadi modal atau bahkan menjadi beban sangat tergantung kepada pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang tersedia. Dengan kata lain terbentuknya penduduk sebagai modal ataupun beban pembangunan sangat tergantung kepada kualitas, komposisi dan pola sebaran dari penduduk tersebut bukan dari jumlah absolutnya.



www.kondisi.kota-binjai.go.id

**Tabel 3.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kota Binjai, 2000 - 2017**

Tahun	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km <sup>2</sup> )
(1)	(2)	(3)
2000 <sup>*)</sup>	213 187	2 362
2001	215 523	2 369
2002	219 145	2 429
2003	223 451	2 476
2004	232 236	2 574
2005	237 904	2 637
2006	244 256	2 707
2007	248 256	2 751
2008	252 652	2 800
2009	257 105	2 849
2010 <sup>*)</sup>	246 154	2 728
2011	248 456	2 754
2012	250 252	2 773
2013	252 263	2 796
2014	261 490	2 898
2015	264 687	2 933
2016	267 901	2 969
2017	270 926	3 003

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Binjai, 2000 - 2017

Catatan : \*) Data Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010

Persebaran penduduk berhubungan dengan pola pemukiman suatu daerah. Beberapa faktor yang mempengaruhi persebaran penduduk antara lain: iklim, letak dan bentuk dataran/tanah, tingkat kesuburan tanah, sumber alam, sosial, budaya dan teknologi. Apabila persebaran penduduk di suatu daerah tidak merata maka akibat langsung yang terjadi adalah kepadatan penduduk yang tidak merata, sehingga dampak selanjutnya erat kaitannya dengan masalah perkembangan ekonomi yang tidak merata dan masalah sosial lainnya.

Dari **Tabel 3.1** di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2000 - 2017 jumlah penduduk Kota Binjai terus meningkat dari tahun ke tahun, yang mana pada tahun 2000 sebanyak 213.187 jiwa, menjadi 215.523 jiwa pada tahun 2001, kemudian pada tahun 2002 menjadi 219.145 jiwa, menyusul untuk tahun 2003 sebanyak 223.451 jiwa, tahun 2004 sebanyak 232.236 jiwa.

Pada tahun - tahun berikutnya jumlah penduduk Kota Binjai juga mengalami peningkatan, yaitu masing - masing pada tahun 2005 sebanyak 237.904 jiwa, tahun 2006 sebanyak 244.256 jiwa, tahun 2007 sebanyak 248.256 jiwa, tahun 2008 menjadi 252.652 jiwa, tahun 2009 sebanyak 257.105 jiwa, tahun 2010 jumlah penduduk sebanyak 246.154 jiwa (data hasil SP2010), tahun 2011 sebanyak 248.456 jiwa dan tahun 2012 sebanyak 252.263 jiwa. Pada tahun 2015, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan menjadi 264.687 jiwa hingga tahun 2017 sebesar 270.926 jiwa.

Perkembangan jumlah penduduk Kota Binjai yang pesat juga dapat dilihat dari kepadatan penduduk per jiwa pada setiap kilometer persegi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000 kepadatan penduduk Kota Binjai sejumlah 2.362 jiwa per km<sup>2</sup>, tahun 2001 sejumlah 2.369 jiwa per km<sup>2</sup>, kemudian berjumlah 2.429 jiwa per km<sup>2</sup> pada tahun 2002, menyusul sejumlah 2.476 jiwa per km<sup>2</sup>, dan 2.574 jiwa per km<sup>2</sup> masing-masing untuk tahun 2003 dan 2004. Pada tahun 2005 - 2017 juga mengalami peningkatan dari 2.637 km<sup>2</sup> menjadi 3.003 km<sup>2</sup> dengan besar laju peningkatan kepadatan penduduk sebesar 13,88 persen.

### 3.2.2 Struktur Umur Penduduk

Dari komposisi penduduk menurut kelompok umur di suatu daerah, dapat diketahui apakah penduduk di daerah tersebut berstruktur umur muda atau berstruktur umur tua. Dikatakan berstruktur umur muda apabila kelompok penduduk yang berusia di bawah 15 tahun jumlahnya besar (lebih dari 35 persen), sedangkan besarnya kelompok penduduk usia 65 tahun keatas lebih kurang 3 persen. Sebaliknya dikatakan berstruktur umur tua apabila kelompok penduduk yang berumur 15 tahun ke bawah jumlahnya kecil (kurang dari 35 persen dari seluruh penduduk) dan persentase penduduk diatas 65 tahun sekitar 15 persen (Mantra, 1985).

**Tabel 3.2 Jumlah Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur, 2012 - 2017**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>0 – 14</b>	72 426	72 976	73 488	73 892	74 231	74 468
<b>15 – 64</b>	172 370	175 066	177 714	180 123	182 545	184 813
<b>65 +</b>	9 726	9 977	10 288	10 672	11 125	11 645
<b>Jumlah</b>	<b>254 522</b>	<b>258 019</b>	<b>261 490</b>	<b>264 687</b>	<b>267 901</b>	<b>270 926</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Binjai 2012 - 2017



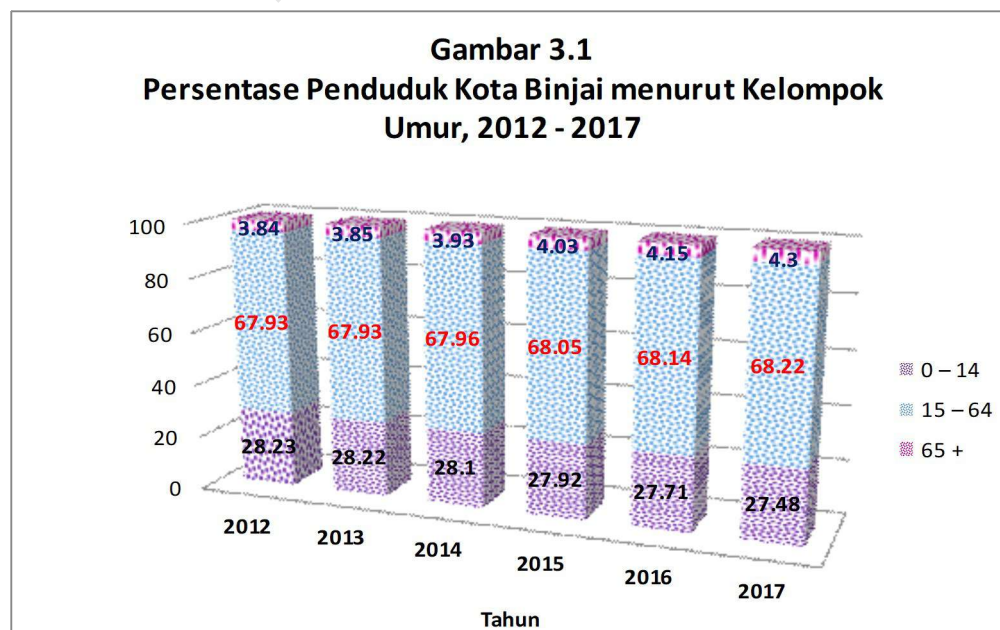
Jumlah penduduk di Kota Binjai pada tahun 2017 untuk kelompok umur 0 - 14 tahun sebanyak 73.900 jiwa, umur 15 - 64 tahun sebanyak 180.120 jiwa dan berumur 65 tahun ke atas sebanyak 10.667 jiwa (Tabel 3.2).

**Tabel 3.3** Persentase Penduduk Kota Binjai Menurut Kelompok Umur, 2012 - 2017

Kelompok Umur	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0 – 14	28,46	28,28	28,10	27,92	27,71	27,48
15 – 64	67,72	67,85	67,96	68,05	68,14	68,22
65 +	3,82	3,87	3,94	4,03	4,15	4,30
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Binjai 2012 - 2017

Bila dilihat komposisi penduduk menurut umur, ternyata penduduk Kota Binjai pada tahun 2017 sebagian besar berada pada kelompok umur produktif (umur 15 – 64 tahun) yaitu sebesar 68,22 persen, kemudian untuk kelompok umur anak-anak (umur 0 – 14 tahun) sebesar 27,48 persen. Sementara itu, untuk penduduk umur 65 tahun ke atas hanya sekitar 4,30 persen (Tabel 3.3). Hal ini memberikan gambaran bahwa potensi kelompok umur produktif perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan sehingga mampu menghasilkan tenaga - tenaga terampil dan mandiri untuk mengisi peluang-peluang ekonomi dan tantangan ke depan pada era perdagangan bebas dan globalisasi.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017



Untuk mengetahui sejauh mana besarnya beban yang ditanggung oleh penduduk berusia produktif (15 - 64 tahun) terhadap penduduk non produktif dapat dilihat dari rasio ketergantungan baik rasio ketergantungan anak (0 - 14 tahun) maupun rasio ketergantungan lansia (> 65 tahun). Di Kota Binjai, rasio beban ketergantungan anak untuk tiap tahun semakin turun, kecuali pada tahun 2013 rasio beban ketergantungan mencapai titik tertinggi di angka 44,82, sementara di tahun 2017 mencapai titik terendah di angka 40,29 (**Tabel 3.4**). Hal ini berarti bahwa untuk 100 orang produktif di Kota Binjai pada tahun 2017 hanya menanggung 40 anak berusia 0 - 14 tahun yang belum produktif.

**Tabel 3.4 Rasio Ketergantungan Usia Penduduk di Kota Binjai, 2012 - 2017**

Rasio Ketergantungan	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>Muda (0-14)</b>	41,57	44,82	41,35	41,02	40,66	40,29
<b>Tua (65+)</b>	5,65	4,80	5,79	5,92	6,09	6,30
<b>Total</b>	<b>47,22</b>	<b>49,62</b>	<b>47,14</b>	<b>46,95</b>	<b>46,76</b>	<b>46,59</b>

Sumber : Proyeksi Penduduk BPS Kota Binjai 2012 - 2017

### 3.3 Pendidikan

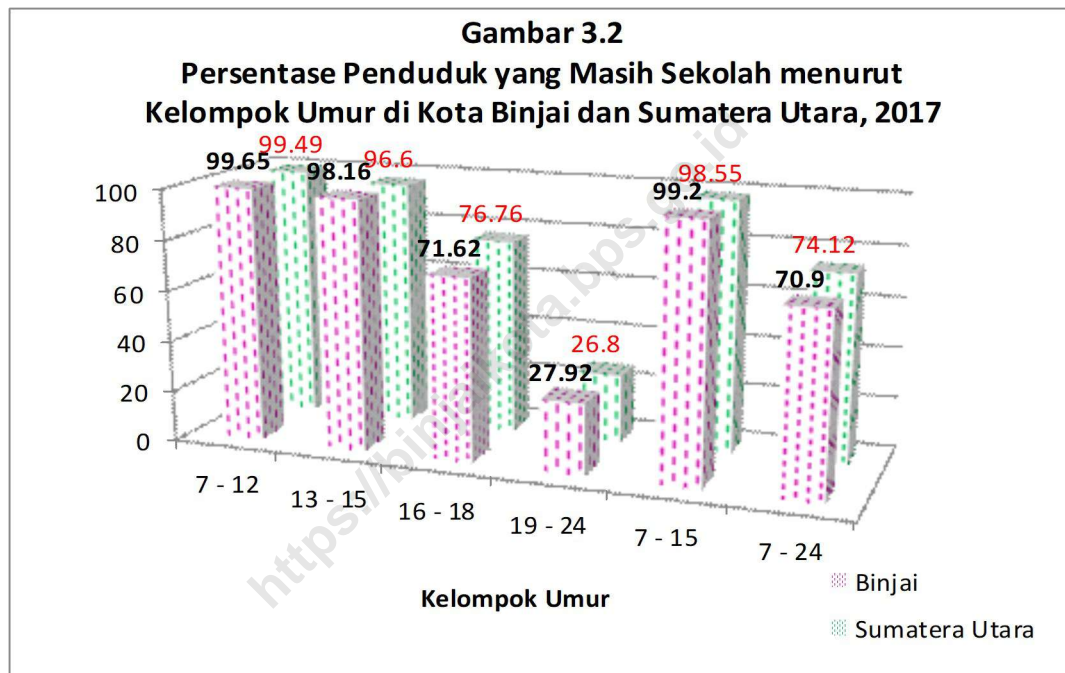
Salah satu amanat yang diemban pemerintah menurut UUD 1945 adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Telah banyak upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat ini, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah termasuk Pemerintah Kota Binjai.

**Tabel 3.5 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas yang Masih Sekolah Menurut Kelompok Umur di Kota Binjai dan Sumatera Utara, 2017**

Kelompok Umur	Binjai	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)
7-12	99,65	99,49
13-15	98,16	96,60
16-18	71,62	76,76
19-24	27,92	26,80
7-15	99,20	98,55
7-24	70,90	74,12

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

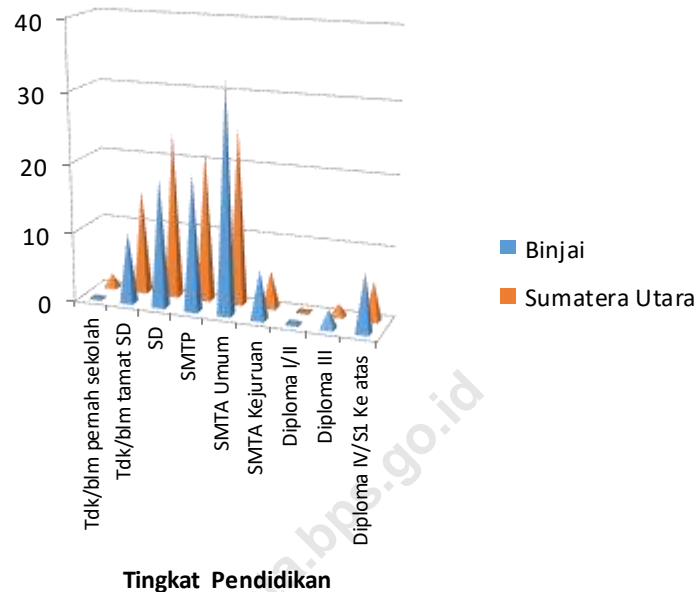
Bila dilihat dari **Tabel 3.5** dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Kota Binjai cukup tinggi, hal ini tercermin diantaranya dari status pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara secara umum. Pada penduduk usia pendidikan tinggi seperti diploma/sarjana (usia 19 - 24 tahun), persentase penduduk yang masih bersekolah di Kota Binjai sebesar 27,92 persen, sebesar 1,12 poin lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk yang masih bersekolah di Provinsi Sumatera Utara, sebesar 26,80 persen. Tingginya persentase penduduk yang masih bersekolah di Kota Binjai ini diduga disebabkan jarak tempuh yang relatif dekat ke lembaga pendidikan tinggi di Sumatera Utara, sehingga memacu mereka untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Selain dari status pendidikan, tingkat pendidikan yang cukup tinggi di Kota Binjai dapat dilihat dari pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dimana persentase penduduk yang menamatkan pendidikannya hingga Diploma IV/Sarjana cukup tinggi yaitu mencapai 8,52 persen, lebih tinggi 2,89 poin dibandingkan penduduk Sumatera Utara. Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas penduduk di Kota Binjai adalah SMTA Umum sebesar 32,67 persen, lebih tinggi sebesar 7,65 poin dibandingkan persentase penduduk yang menamatkan pendidikan hingga jenjang SMTA Umum di Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, untuk penduduk dengan tamatan Diploma I/II dan Diploma III hanya mencapai 0,55 persen dan 2,74 persen. Meskipun demikian, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan persentase Sumatera Utara yang hanya mencapai 0,33 persen dan 1,75 persen.

**Gambar 3.2 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Binjai, 2017**



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

**Tabel 3.6 Persentase Penduduk 10 Tahun ke Atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki di Kota Binjai dan Sumatera Utara, 2017**

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Binjai	Sumatera Utara
(1)	(2)	(3)
Tdk/blm pernah sekolah	0,46	1,96
Tdk/blm tamat SD	10,11	14,91
SD	18,35	23,62
SMTMP	19,57	21,42
SMTA Umum	32,67	25,02
SMTA Kejuruan	7,02	5,36
Diploma I/II	0,55	0,33
Diploma III	2,74	1,75
Diploma IV/S1 Ke atas	8,52	5,63
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

### 3.4 Ketenagakerjaan

Setiap tahun jumlah penduduk Kota Binjai mengalami peningkatan. Hal ini terlihat dari persentase kenaikan jumlah penduduk total dari tahun 2016 – 2017 sebesar 1,13 persen. Lazimnya, peningkatan jumlah penduduk ini akan berbanding lurus dengan peningkatan jumlah angkatan kerja. Namun, data menunjukkan di Kota Binjai pada tahun 2017 terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja menjadi 62,03 persen dibandingkan tahun 2015 sebesar 65,44 persen. Pada **Tabel 3.7** di bawah ini dapat dilihat kegiatan utama seminggu yang lalu dari penduduk di Kota Binjai baik yang termasuk angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja. Tampak bahwa pada tahun 2015 sekitar 65,44 persen termasuk kedalam angkatan kerja. Angkatan kerja disini adalah penduduk 15 tahun keatas yang siap terjun kedalam kegiatan ekonomi, baik yang bekerja maupun yang sedang mencari kerja/ mempersiapkan usaha. Dari 62,03 persen angkatan kerja yang ada di Kota Binjai tahun 2017, persentase penduduk yang bekerja sebesar 58,33 persen, sedangkan persentase penduduk yang berstatus pengangguran terbuka (termasuk yang sedang tidak bekerja karena sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha ) sebesar 3,70 persen.

**Tabel 3.7 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Kegiatan selama Seminggu yang Lalu di Kota Binjai, 2015 - 2017**

KEGIATAN UTAMA	Tahun	
	2015	2017
[1]	[2]	[3]
<b>ANGKATAN KERJA</b>	<b>65,44</b>	<b>62,03</b>
- Bekerja	58,90	58,33
- Pengangguran terbuka	6,54	3,70
<b>BUKAN ANGKATAN KERJA</b>	<b>34,56</b>	<b>37,97</b>
(Sekolah, mengurus rumah tangga, dan lainnya)		
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
Penduduk Usia Kerja (%)		
<b>T P A K</b>	<b>65,44</b>	<b>62,03</b>
<b>TPT</b>	<b>10,00</b>	<b>5,95</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

**Tabel 3.8** Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja selama Seminggu yang Lalu Menurut Jenis Kelamin dan Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Binjai, 2017

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	PERSENTASE		
	Laki-laki (Lk)	Perempuan (Pr)	Lk+ Pr
[1]	[2]	[3]	[4]
1. Pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan dan perikanan	11,17	2,82	7,89
2. Manufaktur	29,18	11,63	22,28
3. Jasa	59,65	85,55	69,83
<b>JUMLAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Angkatan Kerja Nasional 2017

Berdasarkan hasil Sakernas 2017, mayoritas penduduk bekerja di Kota Binjai bergelut pada sektor jasa, sehingga tak jarang Kota Binjai dijuluki sebagai “Kota Jasa”. Hal ini disebabkan karena Kota Binjai secara geografis merupakan kota ‘pinggiran’ (*periphery*) yang merupakan kota satelit karena memiliki lokasi yang sangat berdekatan dengan ibukota provinsi, Kota Medan, sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian penduduk Sumatera Utara. Selain itu, Kota Binjai juga berbatasan langsung dengan 2 kabupaten besar dan potensial, yaitu Kabupaten Deli Serdang sebagai pusat industri perindustrian (manufaktur) serta Kabupaten Langkat sebagai pusat pertanian dan perkebunan.

Pada tahun 2017, penduduk bekerja yang bergelut di sektor jasa di Kota Binjai sebanyak 69,83 persen dengan komposisi pekerja perempuan lebih mendominasi sebesar 85,55 persen dan komposisi pekerja laki - laki sebesar 59,65 persen. Sektor terbesar kedua yaitu sektor manufaktur (meliputi pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, air dan gas dan konstruksi) yang digeluti oleh pekerja di Kota Binjai sebesar 22,28 persen dengan komposisi pekerja laki - laki yang lebih mendominasi yaitu 29,18 persen dan pekerja perempuan sebesar 11,63 persen. Sementara itu, untuk pekerja yang bekerja di sektor pertanian (meliputi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan) menyumbang sebesar 7,89 persen dengan komposisi pekerja laki - laki sebesar 11,17 persen dan komposisi pekerja perempuan sebesar 2,82 persen.

### 3.5 Kemiskinan

Kemiskinan di Indonesia merupakan isu global multidimensi yang sampai saat ini masih dicari penanggulangan efektifnya. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah diimplementasikan oleh pemerintah melalui beberapa instansi, seperti Bantuan Beras Sejahtera (Rastra) , Bantuan Siswa Miskin (BSM), Jamkesmas/Jamkesda, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Masing-masing program tersebut digelontorkan melalui beberapa instansi sesuai dengan tugas dan fungsi instansi dan mempunyai konsep dan sasaran yang berbeda satu sama lain.

Kemiskinan secara umum adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak - hak dasar antara lain :

- Terpenuhinya kebutuhan pangan;
- Kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup
- Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan;
- Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Kemiskinan menurut BPS adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang atau rumah tangga sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum/layak bagi kehidupan. Secara umum konsep kemiskinan terdiri dari dua macam, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Ukuran kemiskinan absolut biasanya dikaitkan dengan kemampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (**basic needs**) yang disebut dengan garis kemiskinan, sedangkan ukuran kemiskinan relatif menunjukkan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif, contohnya membandingkan distribusi pendapatan diantara berbagai golongan penduduk. Di Indonesia, kedua ukuran kemiskinan tersebut dihitung BPS dengan data pengeluaran rumah tangga hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas).

Untuk ukuran garis kemiskinan BPS selama ini menggunakan patokan 2.100 kalori per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non-makanan, seperti untuk keperluan sandang, perumahan, pendidikan dan kesehatan.

Meskipun nilai rupiah dari garis kemiskinan selalu berubah karena adanya perubahan harga barang, baik harga komoditi makanan yang bersifat *volatile* yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung 2.100 kalori maupun harga komoditi non makanan, tetapi dasar penghitungannya sama sekali tidak berubah. Garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan atau disebut juga batas kecukupan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan non-makanan atau disebut dengan batas kecukupan non-makanan (*non-food line*).

Sementara itu, terdapat tiga indikator utama kemiskinan yang digunakan oleh BPS sebagai alat ukur memotret kondisi kemiskinan di Indonesia, yaitu :

1. Persentase Penduduk Miskin (*Headcount Index/P0*)

*Headcount Index* atau yang sering kita dengar sebagai angka kemiskinan digunakan untuk mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.

2. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*)

Indeks kedalaman kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

3. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*)

Indeks keparahan kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Untuk menghitung ketiga indikator tersebut, digunakan Formula Foster-Greer-Thorbecke (FGT). Selain itu, untuk setiap kenaikan persentase penduduk miskin (*headcount index*) tidak selalu diiringi dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index/P1*) atau 3. Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index/P2*) yang menurun pula, begitu pun sebaliknya.

Berdasarkan hasil Susenas 2017, diperoleh garis batas kemiskinan Kota Binjai sebesar Rp.371.387,- dengan persentase penduduk miskin sebesar 6,75 persen, indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,11 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,25. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 dimana keadaan penduduk miskin hanya mencapai 6,67 persen dengan garis kemiskinan sebesar Rp.343.078,- , indeks kedalaman kemiskinan sebesar 1,33 dan indeks keparahan kemiskinan sebesar 0,45.

Besarnya kenaikan garis kemiskinan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar 8,25 persen. Perkembangan garis kemiskinan (*Poverty Line*), angka kemiskinan (*Headcount Index*)/P0, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index*/P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index*/P2) di Kota Binjai selama kurun waktu 7 tahun terakhir dapat dilihat melalui **Tabel 3.8** di bawah ini :

**Tabel 3.9** Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Binjai, 2011 - 2017

Tahun	Garis Kemiskinan (Rupiah)	Persentase Penduduk Miskin (P <sub>0</sub> )	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )	Indeks Keparahan Kemiskinan (P <sub>2</sub> )
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	285 185	7,00	1,01	0,25
2012	295 265	6,72	0,54	0,09
2013	305 596	6,75	0,88	0,21
2014	310 384	6,38	0,88	0,21
2015	322 091	7,03	0,81	0,17
2016	343 078	6,67	1,33	0,45
2017	371 387	6,75	1,11	0,34

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2011 - 2017



## 3.6 Struktur Perekonomian

### 3.6.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah merupakan serangkaian usaha kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan hasil-hasilnya dan mengusahakan pergeseran proses kegiatan ekonomi dari sektor primer ke arah sekunder dan tersier. Dalam usaha pembangunan nasional yang berkelanjutan dan tepat sasaran dilakukan perencanaan pembangunan yang baik dan didukung oleh sarana dan prasarana perekonomian suatu wilayah. Untuk melihat kondisi perekonomian suatu wilayah, dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.

Perkembangan PDRB Kota Binjai setiap tahunnya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik menurut harga berlaku maupun harga konstan tahun 2010. PDRB menurut harga berlaku Kota Binjai pada tahun 2016 tercatat sebesar 9.077.474.300 rupiah meningkat menjadi 9.857.849.500 rupiah pada tahun 2015. Begitu pula dengan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, PDRB Kota Binjai menurut harga konstan 2010 tercatat sebesar 6.935.554.000 rupiah meningkat menjadi 7.309.271.600 rupiah pada tahun 2017. Namun perlu dicermati bahwa PDRB yang tinggi di suatu daerah belum tentu dinikmati oleh masyarakat setempat karena bisa saja PDRB suatu daerah terangkat karena adanya perusahaan-perusahaan besar di mana hasilnya itu sebagian besar ditransfer ke pusat.

Selain dari PDRB, laju pertumbuhan ekonomi juga sebagai indikator pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dalam suatu selang waktu tertentu. Di Kota Binjai, laju pertumbuhan ekonomi dari tahun 2011 – 2017 mengalami fluktuasi walaupun tidak kentara. Pertumbuhan ekonomi tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,07 persen, selanjutnya pada tahun 2014 sebesar 5,83 persen ; 2015 sebesar 5,40 persen dan 2016 sebesar 5,54 persen. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, laju pertumbuhan ekonomi terendah terjadi tahun 2017 yaitu sebesar 5,39 persen. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai masih berada di kisaran 5 - 6 persen. Melihat perkembangan laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami sedikit kemerosotan di tahun 2017, maka sudah selayaknya menjadi fokus perhatian pemerintah daerah untuk menggenjot angka pertumbuhan tersebut agar dapat menggebrak kembali performa perekonomian yang optimal di Kota Binjai. (Lihat **Tabel 3.9**).

**Tabel 3.10** Perkembangan PDRB Kota Binjai Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan (Tahun Dasar 2010) (ribu rupiah), 2011 - 2017

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan	LPE (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
2011	5 526 230,2	5 236 273,9	5,56
2012	6 149.903,5	5 553 625,9	6,06
2013	6 868 456,4	5 890 966,9	6,07
2014	7 649 060,6	6 234 288,4	5,83
2015 <sup>r</sup>	8 382 405,1	6 571 204,0	5,40
2016 <sup>*</sup>	9 077 474,3	6 935 554,0	5,54
2017 <sup>**</sup>	9 857 849,5	7 309 271,6	5,39

*r = Angka Perbaikan*

*\* = Angka Sementara*

*\*\* = Angka Sangat Sementara*

### 3.6.2 PDRB per Kapita

Selain daripada PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi, PDRB perkapita juga merupakan ukuran yang dapat digunakan sebagai indikator mengenai gambaran umum tingkat kesejahteraan penduduk. Namun, PDRB per kapita tidak serta menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat yang sebenarnya karena PDRB yang tinggi di suatu wilayah belum tentu dinikmati oleh seluruh penduduk di wilayah tersebut.

Jika dilihat pada **Tabel 3.10**, tampak bahwa PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Binjai menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2011 PDRB per kapita Kota Binjai tercatat sebesar Rp.22.242.290,- ; tahun 2012 sebesar Rp.24.574.840,- ; tahun 2013 sebesar Rp.27.227.360,- ; tahun 2014 meningkat lagi menjadi Rp.29.251.830,- dan tahun 2015 sebesar Rp.31.669.120,-.

Pada tahun 2017, PDRB per kapita Kota Binjai atas dasar harga berlaku menempati posisi tertinggi dibandingkan tahun - tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 36.385.760,- . Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa bila ditinjau dari segi PDRB per kapita, tingkat kesejahteraan penduduk Kota Binjai semakin membaik tiap tahunnya karena menunjukkan peningkatan nilai yang cukup progresif.

**Tabel 3.11 Perkembangan PDRB per Kapita Kota Binjai (Tahun Dasar 2010) (ribu rupiah), 2011 - 2017**

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
2011	22 242, 29	22 075,26
2012	24 574,84	22 192,13
2013	27 227,36	23 352,48
2014	29 251,83	23 841,40
2015 <sup>r</sup>	31 669,12	24 826,32
2016 <sup>*</sup>	33 837,03	25 888,50
2017 <sup>**</sup>	36 385,76	26 978,85

*r = Angka Perbaikan*

*\* = Angka Sementara*

*\*\* = Angka Sangat Sementara*

# PEMERATAAN PENDAPATAN



Pada tahun 2017, persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok 40 persen penduduk terendah adalah sebesar 20,41 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan penduduk di Kota Binjai cukup rendah.



Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Binjai dan Sumatera Utara 2017

Persentase Penduduk menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Binjai 2017

53,83 %



58,01 %

Binjai

Makanan

Sumatera Utara



46,17 %



41,99 %

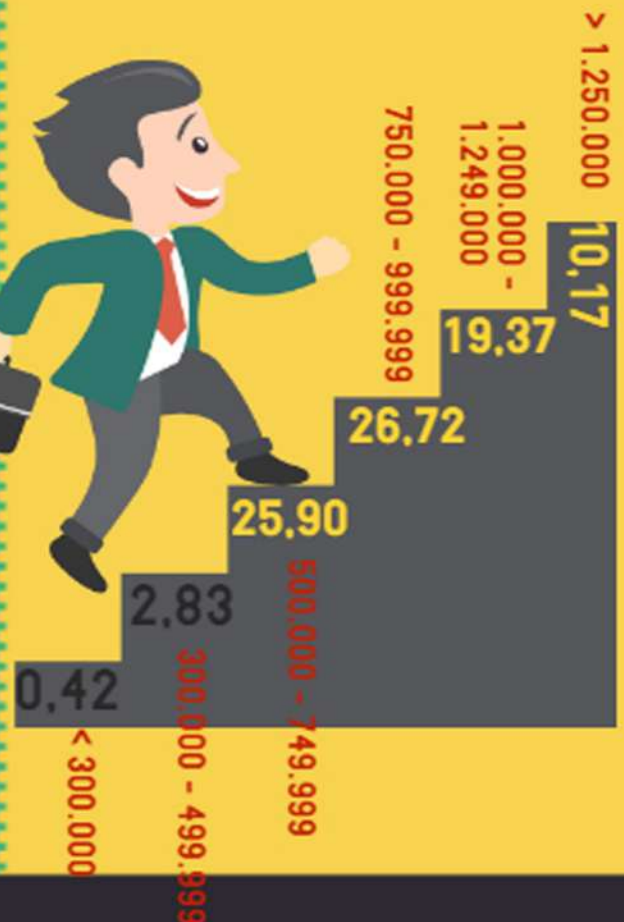
Binjai

Non - makanan

Sumatera Utara



Sumber : Susenas 2017



BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BINJAI



# PEMERATAAN PENDAPATAN

## BAB IV

### 4.1 Perkembangan Tingkat Pendapatan

Tingkat kesejahteraan rumah tangga/penduduk di suatu wilayah, dapat dilihat dari tingkat pendapatannya. Sementara itu, tingkat pendapatan dari rumah tangga/penduduk di daerah tersebut, dapat diukur dengan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu :

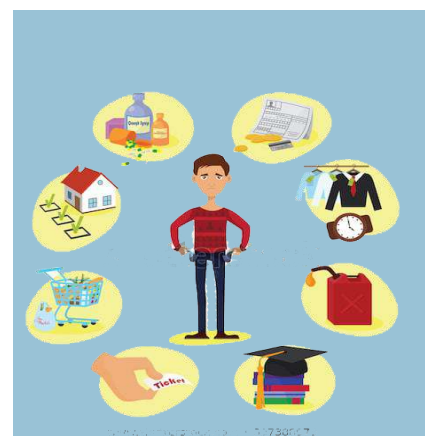
#### 1. Pendekatan Pendapatan

Tingkat pendapatan dari rumah tangga/penduduk tersebut dilihat dari perkembangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dari suatu daerah. Perkembangan PDRB tersebut terkadang tidak mencerminkan keadaan perkembangan tingkat pendapatan rumah tangga/penduduk yang sebenarnya di suatu wilayah.

#### 2. Pendekatan Pengeluaran

Pengeluaran diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan di suatu wilayah.

Pada bab ini akan dibahas perkembangan tingkat pendapatan rumah tangga/penduduk dengan menggunakan pendekatan pengeluaran yaitu dengan cara menelaah data-data hasil Susenas.



**Tabel 4.1** Persentase Penduduk dan Persentase Pengeluaran per Kapita Menurut Golongan Pengeluaran per Kapita Sebulan di Kota Binjai, 2017

Golongan Pengeluaran per Kapita (Rp)	Persentase Penduduk	Persentase Pengeluaran per Kapita
(1)	(2)	(3)
< 200.000	0,42	0,07
200.000 - 299.999	2,83	0,88
300.000 – 499.999	25,90	12,81
500.000 – 749.999	26,72	20,17
750.000 – 999.999	19,37	20,45
1.000.000 – 1.249.999	10,17	13,86
1.250.000 – 1.499.999	6,91	11,72
> 1.500.000	7,68	20,03
<b>Jumlah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Berdasarkan hasil Susenas 2017 (**Tabel 4.1**) persentase pengeluaran per kapita terbanyak di Kota Binjai adalah pada golongan pengeluaran 500.000 - 749.999 rupiah yaitu sebesar 26,72 persen. Kemudian disusul pada golongan pengeluaran antara 300.000 rupiah sampai dengan 499.999 rupiah sekitar 25,90 persen, golongan pengeluaran antara 750.000 sampai dengan 999.999 rupiah sebesar 19,37 persen, golongan pengeluaran antara 1.000.000 sampai dengan 1.249.999 rupiah sebesar 10,17 persen, golongan pengeluaran antara 1.250.000 sampai dengan 1.499.999 rupiah sebesar 6,91 persen. Golongan pengeluaran antara 200.000 sampai dengan 299.999 rupiah yaitu sebesar 2,83 persen. Untuk golongan pengeluaran terendah adalah golongan pengeluaran dibawah 200.000 rupiah yaitu sebesar 0,42 persen.



Dari data Susenas 2017 diperoleh juga informasi bahwa sekitar 20,45 persen penduduk Kota Binjai mempunyai pengeluaran per kapita per bulan diantara 750.000 - 999.999 rupiah. Sedangkan sekitar 20,17 persen penduduk Kota Binjai mempunyai tingkat pengeluaran per kapita per bulan diantara 500.000 - 749.999 rupiah. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat pengeluaran didominasi oleh penduduk yang mempunyai pengeluaran sedang (berkisar antara 500.000 - 999.999 rupiah/kapita/bulan). Hanya sebesar 2,31 persen saja penduduk yang memiliki pengeluaran/kapita/bulan lebih dari 1.500.000 rupiah. Dari **Tabel 4.2** dapat dilihat bahwa rata -rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Binjai tahun 2017 adalah sebesar 820.055 rupiah, di mana untuk pengeluaran makanan sebesar 441.466 rupiah atau sekitar 53,83 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 378.589 rupiah atau sekitar 46,17 persen. Sementara itu, rata -rata pengeluaran per kapita per bulan penduduk Sumatera Utara sedikit berada di atas rata - rata pengeluaran per kapita di Kota Binjai yaitu sebesar 844.163 rupiah, yang terdiri dari pengeluaran untuk makanan sebesar 489.737 rupiah atau sekitar 58,01 persen dan pengeluaran non makanan sebesar 354.426 rupiah atau 41,99 persen.

**Tabel 4.2 Rata - rata Pengeluaran per Kapita per Bulan Menurut Jenis Konsumsi di Kota Binjai dan Sumatera Utara, 2017**

Kota/ Provinsi	Makanan (Rupiah)	Non Makanan (Rupiah)	Jumlah (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kota Binjai</b>	441 466	378 589	820 055
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	489 737	354 426	844 163

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

**Tabel 4.3 Persentase Pengeluaran per Kapita per Bulan Konsumsi Makanan dan Non - Makanan Kota Binjai dan Sumatera Utara, 2017**

Kota/ Provinsi	Makanan (%)	Non Makanan (%)	Jumlah (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Kota Binjai</b>	53,83	46,17	100,00
<b>Provinsi Sumatera Utara</b>	58,01	41,99	100,00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017



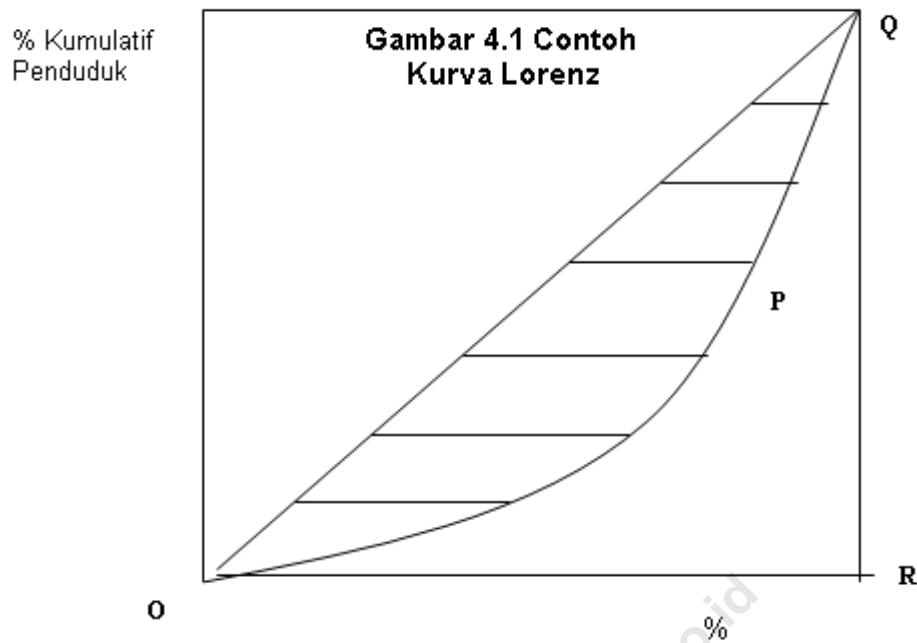
Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Binjai relatif hampir sama dibandingkan dengan pengeluaran per kapita per bulan penduduk Sumatera Utara pada umumnya. Dengan demikian, bila ditinjau dari pendekatan pengeluaran maka tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Binjai relatif sama bila dibandingkan dengan tingkat kesejahteraan penduduk Sumatera Utara pada umumnya.

## 4.2 Pemerataan Pendapatan

Berdasarkan ulasan sebelumnya mengenai persentase pengeluaran konsumsi makanan dan non makanan per kapita per bulan, terlihat bahwa pengeluaran per kapita per bulan penduduk Kota Binjai lebih rendah dibandingkan pengeluaran per kapita per bulan penduduk Sumatera Utara umumnya. Namun gambaran tingkat kesejahteraan ini belum lengkap jika tidak ketahui pola pembagian atau penyebaran dari pendapatan/pengeluaran tersebut. Dengan hanya melihat tingkat kesejahtraannya tanpa melihat pembagian dari kesejahteraan tersebut tentunya akan dapat menyesatkan terutama bagi seorang pengambil keputusan dalam mengatasi masalah ketimpangan pendapatan di wilayahnya.

Masalah ketimpangan pembagian pendapatan tersebut akan terus berlangsung jika tidak ada usaha yang secara khusus diarahkan untuk pemberdayaan mereka yang berada pada posisi yang kurang beruntung. Karena pada umumnya mereka yang berada pada lapisan atas biasanya akan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk berperan aktif dalam proses pembangunan dan akan memperoleh balas jasa yang lebih besar ketimbang penduduk yang lebih miskin.

Untuk mengetahui tingkat ketimpangan pembagian pendapatan, beberapa ukuran dan metode telah dikembangkan oleh beberapa peneliti dan masing-masing mempunyai kelebihan dan kelemahan. Sungguhpun demikian, salah satu ukuran yang paling sering digunakan adalah "**Gini Rasio**". Disamping penghitungannya relatif mudah, ketimpangan pendapatan yang diperoleh melalui kedua ukuran tersebut juga bisa digambarkan secara visual dengan menggunakan kurva Lorenz, seperti contoh berikut ini :



**Gambar 4.1 Contoh Kurva Lorenz**

Melalui kurva Lorenz dapat diketahui persentase pendapatan yang diterima oleh setiap golongan penduduk pada suatu daerah penelitian.

Pada **Gambar 4.1** dapat dilihat, apabila kurva OPQ semakin mendekati garis diagonal OQ menandakan tingkat ketimpangan yang semakin rendah, sedangkan apabila semakin menjauhi garis diagonal (mendekati ORQ) menunjukkan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi. Luas daerah ORQ menunjukkan tingkat ketimpangan yang sempurna. Secara teoritis, perhitungan angka Gini Ratio dengan menggunakan angka pendapatan akan memberikan hasil yang lebih baik, karena bisa memberikan informasi tentang kondisi pembagian pendapatan yang sebenarnya. Tetapi karena data pendapatan sukar diperoleh, maka biasanya digunakan data pengeluaran sebagai proksi atau pendekatan terhadap data pendapatan.

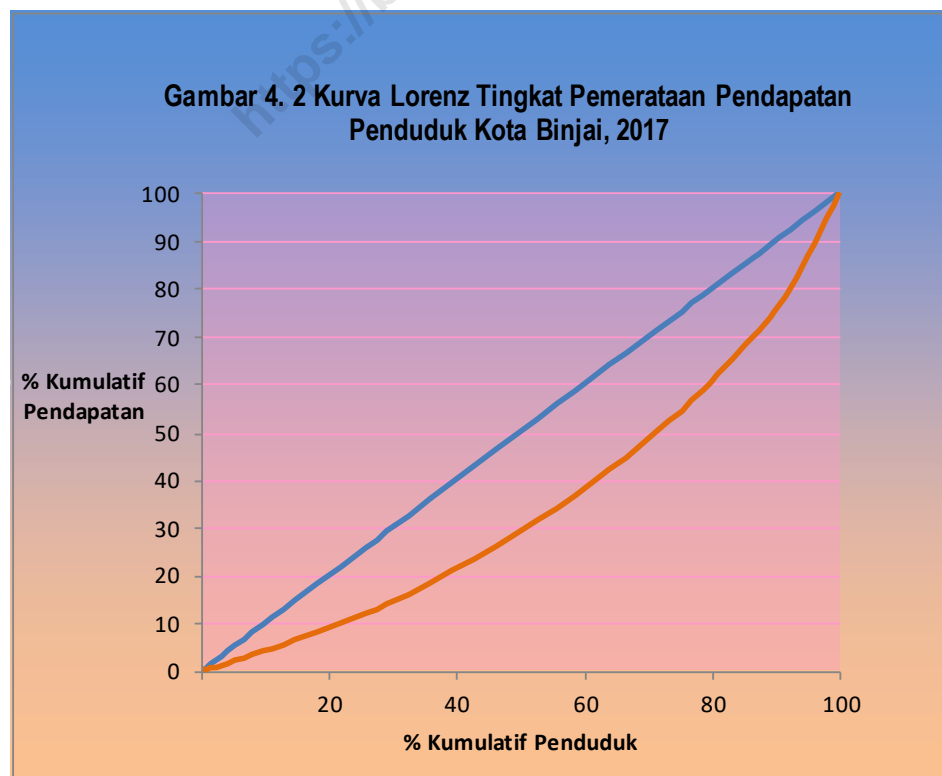
Angka Gini Rasio yang diperoleh dengan menggunakan data pengeluaran cenderung "*under estimate*" karena pengeluaran konsumsi bagi penduduk kaya biasanya lebih rendah dari pada pendapatannya (ada tabungan). Sebaliknya bagi penduduk miskin pengeluarannya bisa sama atau lebih besar dari pendapatannya, karena ada pinjaman, mengambil tabungan, menjual asset atau menerima kiriman dari pihak lain. Masalah yang perlu diperhatikan pada penghitungan Gini Rasio adalah berapa angka Gini Rasio yang dapat diterima dari dan berapa yang sudah menunjukkan tingkat ketimpangan yang serius.

Karena tidak ada standar yang pasti, maka analisa hanya bisa dilakukan dengan cara membandingkan angka Gini Rasio antar daerah atau antar waktu, apakah Gini Rasio semakin kecil, yang berarti distribusi pendapatan makin merata, atau sebaliknya. Sungguhpun demikian, banyak pendapat yang mengatakan bahwa angka Gini Rasio sekitar 0,3 menunjukkan distribusi pendapatan yang cukup merata sedangkan angka Gini Rasio sekitar 0,5 atau lebih berarti tingkat ketimpangan pembagian pendapatan cukup serius.

Dari hasil pengolahan data Susenas 2017 diperoleh hasil bahwa besarnya angka gini rasio Kota Binjai pada tahun 2017 adalah sebesar 0,3163 dan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk terendah adalah sebesar 20,41 persen. Sejalan dengan Kriteria **World Bank**, pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk terendah dapat dibagi menjadi 3 kategori yakni :

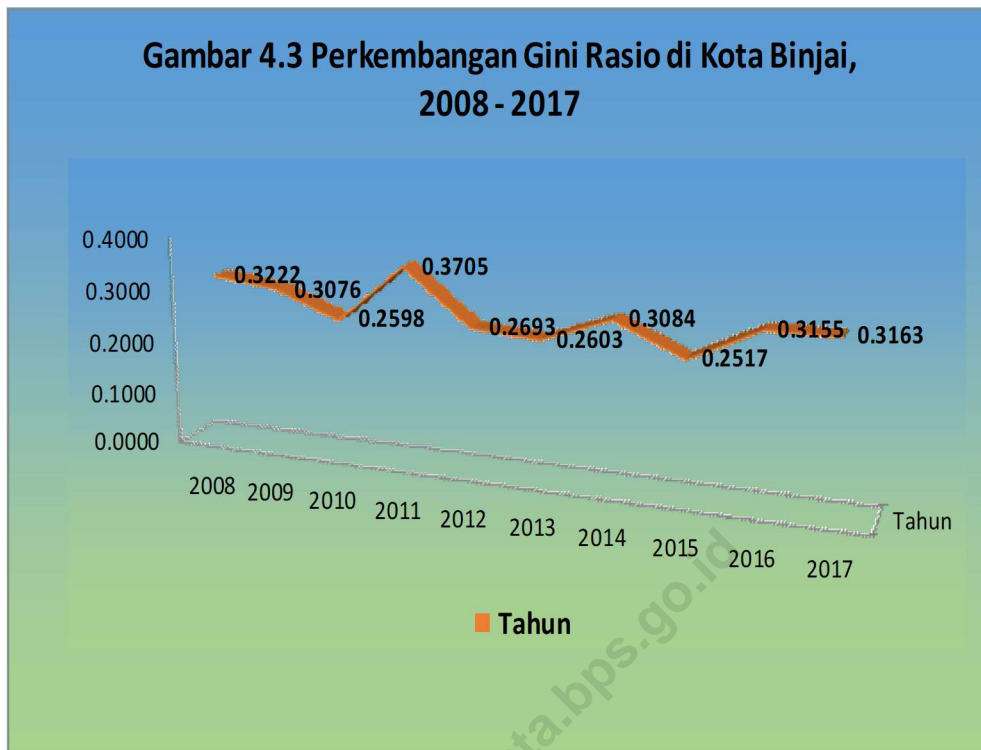
1. kurang dari 12 persen merupakan daerah/wilayah dengan tingkat ketimpangan tinggi
2. 12 - 17 persen merupakan daerah/wilayah dengan tingkat ketimpangan sedaan
3. Lebih dari 17 persen meruapakn daerah/wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah.

Merujuk kriteria *World Bank* tersebut, dapat dikatakan bahwa Kota Binjai secara umum memiliki tingkat ketimpangan pendapatan antar penduduk yang cukup rendah karena kontribusi pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk terendah lebih dari 17 persen.



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

Gambar 4.3 Perkembangan Gini Rasio di Kota Binjai, 2008 - 2017



Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017

<https://binjaikota.bps.go.id>



**BAB**

**5**

**KESIMPULAN & SARAN**



**Analisis  
Pemerataan  
Pendapatan Kota  
Binjai Tahun 2017**

# KESIMPULAN DAN SARAN

*BAB*  
*V*

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan penduduk di Kota Binjai dapat dikatakan cukup baik jika dibandingkan dengan kota - kota lain di Sumatera Utara yang memiliki akses pendidikan yang sulit. Hal ini disebabkan karena jarak tempuh Kota Binjai ke Medan sebagai pusat pemerintahan dan pendidikan di Sumatera Utara relatif dekat.
2. Berdasarkan hasil Sakemas 2017, mayoritas penduduk Kota Binjai bergelut di sektor jasa sebesar 69,83 persen dengan komposisi pekerja perempuan yang bergelut di sektor ini sebesar 85,55 persen dan pekerja laki - laki sebesar 59,65 persen.
3. Persentase penduduk miskin tahun 2017 di Kota Binjai diperkirakan sebesar 6,75 persen dimana angka tersebut lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin tahun 2016 sebesar 6,67 persen dengan persentase kenaikan garis kemiskinan sebesar 8,25 persen.
4. PDRB atas dasar harga berlaku selama kurun waktu 2011 - 2017 mengalami fluktuasi tiap tahunnya dengan nilai PDRB tertinggi di tahun 2017 sebesar Rp. 9.857.849.500,-
5. PDRB per kapita Kota Binjai mengalami peningkatan selama kurun 5 tahun terakhir dengan nilai PDRB per kapita tertinggi di tahun 2017 sebesar Rp. 36.385.760,-
6. Laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai tahun 2011 - 2017 mengalami fluktuasi yang tidak terlalu kentara dengan penurunan terbesar pada tahun 2017 menjadi 5,39 persen.



7. Berdasarkan Susenas 2017, tingkat pengeluaran per kapita per bulan Kota Binjai untuk konsumsi makanan sebesar Rp.441.466,- atau sebesar 53,83 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan persentase pengeluaran konsumsi makanan Provinsi Sumatera Utara yaitu Rp.489.737,- atau 58,01 persen.

## 5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kondisi sosial ekonomi yang ada di Kota Binjai beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai rekomendasi bagi Pemerintah Kota Binjai adalah :

1. Peningkatan jumlah penduduk yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas penduduk, sebab jumlah penduduk yang terus bertambah tanpa diimbangi dengan peningkatan kualitasnya justru akan menjadi beban yang memberatkan.
2. Laju pertumbuhan ekonomi yang mengalami fluktuasi dengan penurunan terendah terjadi pada tahun 2017, yaitu sebesar 5,39 persen. Hal ini agar menjadi perhatian bersama untuk menggenjot produktivitas tenaga kerja di Kota Binjai terutama sektor - sektor potensial seperti sektor jasa dan perdagangan agar dapat memberikan output yang lebih signifikan bagi pembangunan perekonomian Kota Binjai.
3. Potret kemiskinan di Kota Binjai yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 karena kenaikan batas garis kemiskinan agar menjadi perhatian segenap khalayak terutama aparat pemerintahan Kota Binjai untuk mengontrol dan mengendalikan beberapa aspek, misal perhatian terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, harga barang pangan (terutama barang pangan pokok) dan barang non - pangan.
4. Melihat deskripsi beberapa indikator ekonomi terkini di Kota Binjai, maka diharapkan para pengambil kebijakan pemerintahan dapat mengakomodir kesempatan kerja dan kemampuan (*skill*) tenaga kerja yang belum tertampung guna menurunkan angka pengangguran, kemiskinan dan peningkatan laju aktivitas ekonomi.

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA BINJAI**

Jl. W.R. Mongonsidi No.22 Binjai 20714  
Telp. (061) 8826571, Fax : (061) 8821146

Homepage: <http://www.binjainkota.bps.go.id>, E-mail : [bps1276@bps.go.id](mailto:bps1276@bps.go.id)

ISBN 978-602-53496-0-7



9 786025 349607